

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini telah menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Poetih berlangsung melalui kolaborasi antara KPH Perhutani, CV Mitra Abadi, LSM Watu Blorok, serta keterlibatan masyarakat Desa Kupang. Seluruh proses pengelolaan wisata ini menunjukkan dinamika yang kompleks, mulai dari upaya peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan potensi sumber daya alam, hingga tantangan teknis dalam penyediaan fasilitas dan sarana pendukung. Melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini berhasil memetakan berbagai aspek penting terkait mekanisme koordinasi, pola komunikasi antar pihak, serta kecenderungan sikap pelaksana dalam menjalankan peran masing-masing.

Dengan mengacu pada teori implementasi Edward III, temuan penelitian memperlihatkan adanya keberhasilan di beberapa aspek, namun di sisi lain juga muncul sejumlah kendala yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar tujuan pengembangan pariwisata dapat tercapai secara optimal. Namun demikian, hasil temuan juga memperlihatkan sejumlah keterbatasan yang masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan wisata ini.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pada Wisata Bukit Kayoe Poetih tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis pengelola, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas

komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen para pelaksana, serta kejelasan struktur birokrasi yang menaungi proses pengelolaan.

1. Aspek Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi dalam pengelolaan Wisata Bukit Kayoe Poetih berjalan cukup baik pada lingkup internal, khususnya antara KPH Perhutani, CV Mitra Abadi, dan LSM Watu Blorok melalui koordinasi rutin dan komunikasi informal. Namun, masih terdapat gap pada komunikasi eksternal, terutama dalam aspek promosi dan publikasi.

Media sosial resmi tidak lagi aktif sejak 2023 sehingga informasi tentang kegiatan dan potensi wisata kurang tersebar. Minimnya strategi pemasaran digital membuat wisata ini belum dikenal luas oleh masyarakat luar Mojokerto. Dengan demikian, meskipun komunikasi internal efektif, komunikasi eksternal masih belum optimal dalam mendukung tujuan pengelolaan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan belum mendukung sepenuhnya proses pengelolaan wisata, karena belum mampu menciptakan aliran informasi yang jelas, rutin, dan seragam di antara pihak yang terlibat.

2. Aspek Sumber Daya

Pada aspek sumber daya ditemukan gap negatif berupa keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, minimnya pelatihan

teknis terkait pariwisata, serta tidak memadainya dukungan anggaran. Hal ini menyebabkan pengembangan program wisata edukatif belum berjalan optimal.

3. Aspek Disposisi

Menunjukkan adanya gap positif berupa komitmen pengelola inti, perangkat desa, dan karang taruna dalam mendukung operasional wisata. Namun, gap negatif juga ditemukan karena sebagian masyarakat belum terlibat secara optimal akibat manfaat ekonomi yang belum merata.

4. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menunjukkan gap positif melalui pembagian peran yang jelas antara KPH Perhutani, CV Mitra Abadi, LMDH, dan pemerintah desa. Meski demikian, diperlukan penguatan SOP serta perencanaan jangka panjang agar implementasi pengelolaan wisata lebih terarah

Berdasarkan simpulan di atas maka keempat aspek baik komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sumber daya merupakan keempat variabel yang berkaitan, yakni komunikasi yang belum konsisten berdampak pada koordinasi dan pemahaman peran, keterbatasan sumber daya mempengaruhi kelancaran operasional, variasi disposisi pelaksana berdampak pada tingkat partisipasi, dan struktur birokrasi yang secara formal telah ada namun belum berjalan sepenuhnya fungsional.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan simpulan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan di bidang pengelolaan wisata, pelayanan publik, dan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama pihak pengelola, seperti KPH Perhutani Mojokerto dan CV Mitra Abadi, dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan pariwisata untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional dan berkelanjutan. Dalam aspek pendanaan dan sarana prasarana, disarankan adanya dukungan anggaran baik dari pemerintah daerah maupun mitra swasta untuk memperbaiki infrastruktur pendukung seperti jalan akses, tempat parkir, dan fasilitas kebersihan. Pengelola juga dapat mengembangkan sistem kemitraan berbasis bagi hasil dengan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi wisata guna memperluas partisipasi masyarakat serta meningkatkan pendapatan lokal. Saran dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan kesenjangan negatif yang ditemukan pada masing-masing indikator implementasi kebijakan. Rekomendasi berikut disusun untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan dan mendukung optimalisasi pengelolaan Pariwisata Bukit Kayoe Poetih. Setiap saran disesuaikan dengan kebutuhan perbaikan pada indikator yang bersangkutan serta mempertimbangkan kapasitas kelembagaan yang ada.

1. Aspek Komunikasi, pengelola perlu meningkatkan konsistensi komunikasi eksternal dengan mengaktifkan kembali media sosial

resmi serta menyusun strategi promosi yang terstruktur agar penyebaran informasi kepada publik berlangsung lebih efektif.

2. Aspek Sumber Daya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis yang melibatkan pemerintah daerah maupun institusi profesional, serta penguatan dukungan anggaran untuk mendukung pengembangan program wisata Educalyptus.
3. Aspek Disposisi, pengelola perlu memperluas partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM program pelatihan usaha, dan perluasan ruang ekonomi lokal agar manfaat wisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh warga desa.
4. Aspek Struktur Birokrasi, perlu dilakukan penyempurnaan SOP dan penetapan perencanaan jangka panjang pengembangan wisata, khususnya untuk kegiatan edukasi kayu putih, guna memastikan keselarasan antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya.